

**PEMBINAAN NILAI-NILAI ETIKA APARATUR SIPIL
NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE***

(Pendekatan Holistik dengan Metode Kualitatif –
Analisis *Fenomenologi-Hermeneutik*)

DISERTASI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Doktor
Pendidikan Umum dan Karakter**



Oleh

**Fadhilah
NIM 1403049**

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN UMUM DAN KARAKTER
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

2020

Halaman Hak Cipta

**PEMBINAAN NILAI-NILAI ETIKA APARATUR SIPIL
NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE***
**(Pendekatan Holistik dengan Metode Kualitatif –
Analisis *Fenomenologi-Hermeneutik*)**

DISERTASI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar
Doktor Pendidikan Umum dan Karakter**

**Fadhilah 2020
Universitas Pendidikan Indonesia 2020
Januari 2020**

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Disertasi ini tidak boleh di diperbanyak seluruhnya atau sebagian,
dengan dicetak ulang, difoto kopi, atau cara lainnya tanpa ijin dari penulis.

FADHILAH
NIM :1403049/PO471

PEMBINAAN NILAI-NILAI ETIKA APARATUR SIPIL NEGARA
UNTUK MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*
(Pendekatan Holistik dengan Metode Kualitatif –
Analisis *Fenomenologi-Hermeneutik*)

Disetujui dan Disyahkan Oleh Panitia Disertasi

Promotor :

Prof. Dr., H. Encep Syarief Nurdin, M.Pd., M.Si.
NIP.196106181987031002

Ko-Promotor

Prof. Dr., H.Asep Syamsul Bahri, M.Pd.
NIP.19530825198203

Anggota

Dr. H. Ahmad Syamsu Rizal., M.Pd.
NIP. 195510021986011001

Pengaji

Prof. Dr. Kokom Komalasari, M.Pd.

Pengaji

Prof. Dr.H. Yosi Adiwisstra, M.Si.

Mengetahui Ketua Program Studi

Pendidikan Umum dan Karakter Sekolah Pasca Sarjana

Universitas Pendidikan Indonesia

Prof. Dr., H. Encep Syarief Nurdin, M.Pd., M.Si.
NIP.196106181987031002

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya fenomena *bad governance* pasca reformasi. Faktor utamanya adalah karakter moral Aparatur Sipil Negara (ASN). Lokasi penelitian di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Bekasi.

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana implementasi nilai etika ASN di kantor DPM-PTSP untuk mewujudkan *Good Governance*, menggali nilai-nilai karakter apa yang perlu dikembangkan dalam pembinaan nilai etika ASN, serta merumuskan model pembinaan tersebut.

Kebaruan penelitian ini dari perspektif holistik dan metode yang fenomenologi-hermeneutik untuk mengungkap temuan masalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan nilai etika ASN di kantor DPM-PTSP Kota Bekasi secara umum sudah baik, terbukti dari prestasi kinerja DPM-PTSP dengan rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat termasuk kategori pelayanan terpadu sangat baik (2018) dan terbaik nasional (2011-2014).

Karakter yang perlu dikembangkan dalam pembinaan nilai etika ASN: *responsiveness*, transparansi, partisipasi masyarakat, dan demokrasi. Temuan maknanya adalah pembinaan nilai etika ASN untuk mewujudkan *Good Governance* merupakan implementasi nilai dasar Pancasila untuk mewujudkan manusia utuh.

Temuan masalahnya adalah belum terbentuknya karakter moral otonom ASN, sehingga peneliti merekomendasikan pentingnya pembinaan nilai etika ASN secara intensif dan berkelanjutan dengan kepemimpinan transformasional; ekstensifikasi Peraturan Daerah tentang prinsip-prinsip *Good Governance* untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Metode pembelajaran kontekstual juga dibutuhkan pada materi Pendidikan Umum dan Etika Pemerintahan di Program Studi yang mencetak calon Aparatur Sipil Negara.

Kata kunci: Pembinaan, Nilai, Etika Aparatur Sipil Negara, *Good Governance*

ABSTRACT

This research is motivated by the rampant phenomenon of bad governance following reform. The main factor is the moral character of the State Civil Apparatus (ASN). The location of the study was at the Office of the One-Stop Integrated Investment and Services Office (DPM-PTSP) in Bekasi City.

The aim of this study is to find out how the implementation of ASN ethical values in the DPM-PTSP office is to achieve good governance, to explore what character values need to be developed in the promotion of ASN ethical values, and to formulate a coaching model. The novelty of this research from a holistic perspective and a phenomenological-hermeneutic method of discovering the findings of the problem.

The results of this study promoting the ethical values of ASN at the DPM-PTSP office in Bekasi City are generally good, as demonstrated by the DPM-PTSP performance of the average Community Satisfaction Index, including the excellent integrated service categories (2018) and the national best (2011-2014).

Characters that need to be developed in fostering ASN ethical values: responsiveness, transparency, community participation, and democracy. The discovery of sense is the creation of ASN ethical values for the realization of Good Governance, the realization of the fundamental values of Pancasila for the realization of the whole human being.

The finding of the problem is that the autonomous moral character of ASN has not yet been developed, which is why the researcher advises the importance of intensive and sustainable development of ASN ethical values with transformational leadership; Extension of local regulations on the principles of good government in order to increase public participation. Contextual learning approaches are also included in the General Education and Government Ethics materials of the Study Program, which prints candidates for the State Civil Apparatus.

Keywords: Coaching, Values, Ethics of the State Civil Apparatus, Good Governance

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PEN PERNYATAAN TENTANG KEASLIAN DISERTASI.....	iii
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR BAGAN	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
BAB I.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian	12
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian dan Signifikansi Penelitian	13
1.4.1. Manfaat Teoritis	13
1.4.2. Manfaat Praktis	14
1.4.3. Manfaat bagi Kebijakan	15
1.5. Struktur Organisasi Disertasi	15
BAB II	17
2.1. Tinjauan Umum Tentang Nilai dan Etika Aparatur Sipil Negara	17
2.1.1. Sejarah Timbulnya Teori Nilai dan Etika dalam Tinjauan Filosofis.....	17
2.1.2. Teori Nilai dalam Konteks Pendidikan Nilai	19
2.1.2.1. Terminologi Nilai	19
2.1.2.2. Klasifikasi Nilai.....	22
2.1.2.3. Hirarki Nilai.....	24
2.2. Teori Etika sebagai Dasar Memahami Makna Nilai	27
2.2.1. Jenis Etika	28
2.2.1.1. Etika Hedonisme	28
2.2.1.2. Etika Eudomonisme	29
2.2.1.3. Etika Utilitarianisme/ etika Teleologis	30
2.2.1.4. Etika Deontologis /Etika Kewajiban (<i>Imperative Categories</i>) I.Kant	31
2.2.1.5. Etika Religius (<i>Theologis/</i>).....	32
2.2.2.Etika Deontologis /Etika Kewajiban (<i>Imperative Categories</i>) Immanuel Kant sebagai Landasan Moral Standar Aparatur Sipil Negara.....	34
2.2.3.Etika Sosial sebagai Dasar untuk Memahami Fenomena <i>Bad Governance</i>	37
2.3. Landasan Filosofis Pendidikan Umum dan Karakter	38

2.3.1. Filsafat Ilmu Immanuel Kant	44
2.3.2. Filsafat Ilmu Jurgen Habermas.....	45
2.4. Konsep Pendidikan Nilai sebagai Substansi Pendidikan Umum dan Karakter.....	46
2.4.1. Terminologi Pendidikan Nilai	46
2.4.2. Konsep Dasar Pendidikan Karakter Relevansinya dengan Pembinaan Nilai- Nilai Etika Aparatur Sipil Negara	47
2.4.3. Ruang Lingkup Pendidikan Nilai sebagai Substansi Pendidikan Umum dan Karakter Relevansinya dengan Problem Etika, dan <i>Pembinaan Nilai-Nilai Etika Aparatur Sipil Negara (ASN)</i>	48
2.4.4. Paradigma Baru Pendidikan Karakter.....	52
2.4.5. Paradigma Baru Pendidikan Karakter sebagai Dasar Pengembangan Karakter Dalam Pembinaan Nilai-Nilai Etika Aparatur Sipil Negara Sipil Negara (ASN)	54
2.4.6. Metodologi Pendidikan Nilai	55
2.4.7. Beberapa Alternatif Pendekatan dan Model Pendidikan Nilai dalam Rangka Pembinaan Nilai- Nilai Etika Aparatur Sipil Negara untuk Mewujudkan <i>Good Governance</i>	57
2.4.7.1. Pendekatan nilai menurut filsafat sosial Durkheim (<i>Konteks Sosial</i>).	58
2.4.7.2. Pendekatan nilai <i>moral rasional</i> Immanuel Kant.....	59
2.4.7.3. Teori Perkembangan Moral menurut Kohlberg (<i>Kohlberg Stages of Moral Development</i>) dan <i>Pembedaan Tipe Moral</i> menurut Kohlberg.....	60
2.4.7.4. Model Rational Building(RBM)	62
2.5. Kepemimpinan sebagai Pendukung dalam Pembinaan Nilai- Nilai Etika Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk Mewujudkan <i>Good Governance</i>	69
2.5.1. Definisi Kepemimpinan	69
2.5.2. Jenis Teori Kepemimpinan	70
2.5.3. Pengaruh Tipe Kepemimpinan terhadap Praktek <i>Good Governance</i>	72
2.6. Hakekat Pemerintahan	74
2.7. Etika Pemerintahan	74
2.7.1. Asas-Asas Pemerintahan	75
2.7.2. Asas-Asas Etis Pemerintahan	76
2.7.3. Kode Etik Administrasi Pemerintahan.....	77
2.7.4. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> (<i>UNDP</i>) sebagai andasan Kode Etik Pemerintahan Indonesia Era Reformasi	80
2.7.5. Prinsip dan Indikator <i>Good Governance</i> Menurut BAPPENAS	88
2.7.6. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> sebagai Orientasi untuk Mewujudkan Visi-Misi dan Rencana Kerja Pemerintah Reformasi	90
2.7.7. Implementasi Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Visi-Misi Pemerintah Era Reformasi	93
2.7.8. Landasan Yuridis Standar Pelayanan Publik	95
2.7.8.1. Standar <i>Penyelenggaraan</i> Pelayanan Publik.....	95
2.7.8.2. Standar <i>Perilaku</i> Pelaksana Pelayanan.....	96

2.7.8.3. Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintahan Indonesia	97
2.7.8.4. Nilai Dasar ASN sebagai Landasan Yuridis Standar Pelayanan Prima	98
2.7.8.5. Panca Prasetya KORPRI sebagai Landasan Nilai Moral bagi Aparatur Sipil Negara	98
2.8. Hasil Penelitian Terdahulu	99
2.8.1. Penelitian tentang Pengaruh Implementasi Nilai Etika Pemerintahan dan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> Terhadap Kinerja Pelayanan Publik	99
2.8.2. Hubungan Pengendalian Moral Individu dengan Akuntansi Keuangan	100
2.8.3. Penelitian Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Publik	102
2.8.4. Penelitian Pada Objek Sejenis (Unit Pelayanan Terpadu).....	103
BAB III.....	106
3.1. Desain Penelitian Kualitatif	106
3.1.1. Paradigma Penelitian Fenomenologi	106
3.1.2. Analisis Makna dalam Metode <i>Fenomenologi-Hermeneutik</i>	107
3.1.3. Fenomenologi- Hermeneutika sebagai Metode Sintesis <i>Philosophis- Scientific</i> dalam Memahami Fenomena <i>Bad Governance</i> dan Praktek <i>Good Governance</i>	109
3.1.4. Desain Penelitian Kualitatif Analisis Fenomenologi- Hermeneutik	110
3.2. Partisipan, Waktu dan Lokasi Penelitian	111
3.2.1. Partisipan/Subjek Penelitian/ Informan.....	111
3.2.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	112
3.3. Pengumpulan Data	113
3.3.1. Tahap Perencanaan (Pra Lapangan)	113
3.3.2. Instrumen Penelitian	114
3.3.3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	114
3.3.3.1. Observasi.....	115
3.3.3.2. Wawancara	116
3.3.3.3. Catatan Lapangan	116
3.3.3.4. Analisis dan Penggunaan Dokumen	117
3.3.3.5. Sampling dan Satuan Kajian (<i>Unit of Analysis</i>)	117
3.4. Analisis Data	117
3.4.1. Penelaahan data dan Reduksi	118
3.4.2. Pemrosesan Satuan (<i>Unityzing</i>)	118
3.4.3. Kategorisasi Data (Koding)	119
3.4.4. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	120
3.4.4.1. Perpanjangan Keikutsertaan (Waktu Penelitian).....	120
3.4.4.2. Ketekunan pengamatan.....	121
3.4.4.3. Triangulasi.....	121
3.4.4.4. Kecukupan Referensial.....	122
3.4.4.5. Kajian kasus negatif	124
3.4.4.6. Pengecekan anggota	124

3.4.4.7. Uraian Rinci.....	124
3.4.4.8. Audit Kebergantungan.....	125
3.4.4.9. Audit Kepastian.....	125
3.4.5. Analisis dan Penafsiran Data (Proses Pemaknaan berdasarkan Analisis <i>Fenomenologi-Hermeneutik</i>).....	126
3.4.6. Perumusan Teori Substantif	126
3.5. Definisi Operasional /Penjelasan Istilah	127
3.5.1. Pembinaan.....	127
3.5.2. Nilai Etika Aparatur Sipil Negara	127
3.5.3. Konsep <i>Good Governance</i> dan Prinsip- Prinsip <i>Good Governance</i>	127
BAB IV	129
4.1. Deskripsi Objek Penelitian	129
4.1.1. Profil Organisasi Pemerintah Kota Bekasi	129
4.1.2. Visi-Misi Kota Bekasi.....	129
4.1.3. Profile Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM- PTSP) Kota Bekasi	133
4.1.4. Visi dan Misi DPM-PTSP Kota Bekasi	135
4.1.5. Tugas Pokok dan Fungsi DPM-PTSP Kota Bekasi	136
4.1.6. Strategi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan DPM-PTSP Kota Bekasi Relevansinya dengan Pembinaan Nilai-Nilai Etika ASN Untuk Mewujudkan <i>Good Governance</i>	137
4.2. Temuan.....	138
4.2.1. Implementasi Etika Aparatur Sipil Negara DPM-PTSP Kota Bekasi	139
4.2.1.1. Implementasi Nilai Etika ASN dalam Kinerja DPM- PTSP Kota Bekasi....	140
4.2.1.2. Implementasi Nilai Etika ASN dalam Kinerja DPM-PTSP Kota Bekasi Berdasarkan Nilai <i>Standar Pelayanan Prima</i>	172
4.2.1.3. Implementasi Nilai Etika ASN dalam Kinerja Pelayanan Publik DPM- PTSP Kota Bekasi Berdasarkan <i>Prinsip Pelayanan Publik</i> (Keputusan MENPAN Nomor 63/2004).....	176
4.2.1.4. Implementasi Nilai Etika ASN dalam Kinerja Pelayanan DPM-PTSP Berdasarkan Data Sekunder-Internal DPM-PTSP Kota Bekasi	185
4.2.1.5. Implementasi Nilai Etika ASN dalam Kinerja DPM-PTSP Kota Bekasi Berdasarkan Data Sekunder: Hasil Penelitian Terdahulu tentang Nilai IKM Seluruh SKPD Kota Bekasi Tahun 2015 oleh Tim Peneliti FISIP UNISMA Bekasi	188
4.2.1.6. Faktor-Faktor Pendukung Implementasi Etika ASN dalam Kinerja Pelayanan DPM-PTSP Kota Bekasi.....	
4.2.2. Nilai-Nilai Karakter yang Perlu Dikembangkan dalam Pembinaan Nilai Etika Aparatur Sipil Negara DPM-PTSP Kota Bekasi	197
4.2.3. Proses Pembinaan Nilai Etika Aparatur Sipil Negara DPM-PTSP Kota Bekasi	199
4.3. Pembahasan	201
4.3.1. Implementasi Etika Aparatur Sipil Negara DPM-PTSP Kota Bekasi	201

4.3.1.1. Analisis Fenomenologi-Hermeneutik terhadap Faktor Pendukung Implementasi Etika Aparatur Sipil Negara DPM-PTSP Kota Bekasi.....	203
4.3.1.2. Analisis Fenomenologi-Hermeneutik terhadap Kendala Implementasi Etika Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> di Kantor DPM-PTSP Kota Bekasi	204
4.3.1.3. Analisis Fenomenologi-Hermeneutik terhadap Pengaruh Implementasi Nilai Etika ASN dalam Kinerja Aparatur DPM-PTSP untuk Mewujudkan <i>Good Governance</i> sesuai Visi Misi Kota Bekasi	208
4.3.2. Nilai-Nilai Karakter yang Perlu Dikembangkan dalam Pembinaan Nilai Etika Aparatur Sipil Negara DPM-PTSP Kota Bekasi untuk Mewujudkan <i>Good Governance</i>	211
4.3.3. Proses Pembinaan Nilai Etika Aparatur Sipil Negara DPM-PTSP Kota Bekasi	214
4.3.4. Model Pembinaan Nilai Etika Aparatur Sipil Negara DPM-PTSP Kota Bekasi	217
4.3.4.1. Kerangka Analisis Konseptual Proses Pembinaan Nilai-Nilai Etika Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pendekatan <i>Fenomenologi - Hermeneutik</i>	220
4.3.4.2. Analisis Konseptual Pembinaan Nilai Etika Aparatur Sipil Negara DPM-PTSP Kota Bekasi untuk Mewujudkan <i>Good Governance</i>	222
4.3.4.3. Model Empiris Pembinaan Nilai Etika Aparatur Sipil Negara DPM-PTSP Kota Bekasi.....	228
4.3.4.4. Model Hipotetik Pembinaan Nilai Etika Aparatur Sipil Negara DPM-PTSP Kota Bekasi.....	229
BAB V.....	239
5.1. Simpulan.....	239
5.1.1. Simpulan Umum	239
5.1.2. Simpulan Khusus	240
5.1.3. Dalil Berdasarkan Hasil Penelitian.....	240
5.2. Implikasi Penelitian:.....	242
5.2.1. Implikasi bagi Bidang Ilmu Pendidikan Umum dan Karakter	242
5.2.2. Implikasi bagi Organisasi Pemerintah Daerah	242
5.2.3. Implikasi bagi Lembaga Hukum.....	242
5.3. Rekomendasi.....	242
5.3.1. Rekomendasi bagi Bidang Ilmu Pendidikan Umum dan Karakter	242
5.3.2. Rekomendasi bagi Organisasi Pemerintah, khususnya DPM-PTSP Kota Bekasi dan Unit Pelayanan Publik.....	242
5.3.3. Rekomendasi bagi Lembaga Pendidikan Tinggi yang Mempersiapkan Calon Tenaga Aparatur Pelayanan Publik.....	243
DAFTAR PUSTAKA	244
DAFTAR LAMPIRAN.....	253
BIODATA PENULIS.....	254

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anulkarim dan Terjemah*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia
- Al-Ghazali, *Ihya'ulum al-Din*, terj. Prof. Ismail Yakub. (1985). Jakarta: CV. Faizan, jilid. 7, cet. 3. Ghufron, Nur, Ismail Yakub (1988). Jakarta: Erlangga.
- Tafsir, Ahmad. (2012). *Filsafat Ilmu*. Bandung: Rosdakarya Alwasilah,
- A.C.(2009).Pokoknya Kualitatif:Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif.Bandung: Andira.
- Bertens, K. (2015). *Etika*, edisi revisi, Yogyakarta: Kanisius.
- BAPPENAS. (2007). *Indikator Minimal Good Governance*. Jakarta: Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik).
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, John W., (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset(Memilih di antara Lima Pendekatan)*, penerj. Ahmad Lintang Lazuardi.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dubrin, Andrew J. 2005. *Leadership* (Terjemahan). Edisi Kedua. Jakarta: Prenada Media.
- Dwiyanto, A. (2010). *Manajemen Pelayanan Publik:Peduli, inklusif dan Kolaboratif*.cet-1. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Danim, S. (2012). *Kepemimpinan Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Dwiyanto, A.(2011). *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*.Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Frondizi. (2012). *Filsafat Nilai*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fraenkel, J.R.(1977). *How to Teach about Values: An Analytic Approach*. Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Gadamer, H.G. (2004), *Kebenaran dan Metode (Thruth and Methode)*, Pengantar *Filsafat Hermeneutika*.Yogyakrta: Pustaka Pelajar.
- Gie, The Liang. (2014). *Etika Administrasi Pemerintahan. In: Studi tentang Etika Umumnya dan Etika Administrasi Pemerintahan Khususnya*. edisi ke-3. Jakarta: Universitas Terbuka
- Graham, John, 2003, *Principles for Good Governance in the 21st Century, Policy Brief No.15*. Canada: Institut On Governance, Ottawa.
- Hadiwijono, H. (2005). *Sari Sejarah Filsafat Barat* 2.cet-19. Yogyakarta: Kanisius.
- Hanstedt, P. (2012). *General Education Essentials*, AA (Associationof American Colleges and Universities). Jossey-Bass a a Wiley Imprint.
- Haryatmoko. (2003). *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Howard, C.C. (1992). *Theories of General Education(A.Critical Approach)*.New York: St.Martin's Press.
- Kleden, I. (2017). *Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Penelitian ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press
- Kattsoff, L.O. (1986). *Pengantar Filsafat*.cet-1.penerj. Soemargono,S.Yogyakarta:Tiara Wacana.
- Kaelan, M.S. (2008).*Pendidikan Pancasila (Pendidikan untuk Mewujudkan Nilai-Nilai Pancasila, Rasa Kebangsaan dan Cinta Tanah Air, sesuai*

- SK.DIRJEN DIKT No.43/DIKTI/Kep/2006. edisi Reformasi.Yogyakrta:Paradigma.
- Kama,A.H.(2007).*Pengantar Pendidikan Nilai*.Bandung:Yasindo Multi Aspek.
- Kama, A.H.(2010).*Bunga Rampai Nilai Moral dalam Kajian Pendidikan*. Bandung: CV Yasindo Multi Aspek.
- Kama, A.H. dan Nurdin, E.S. (2016). *Metode Internalisasi Nilai-Nilai (Untuk Memodifikasi Perilaku Berkarakter)*.cet.2. Bandung: CV.Maulana Medika Grafika.
- Keban, Yeremias T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep,Teori dan Isu*.cet.1.Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Kleden, I. (1983). *Teori ilmu sosial sebagai variabel sosial: Suatu tinjauan filsafat sosial*, Prisma Juni. Jakarta: LP3ES.
- Komalasari, K. (2017). *Pendidikan Karakter (Konsep dan aplikasi Living Values Education)*, cet.1. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Kuswara, E. (2009). *Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi, Konsepsi, Pedoman Dan Contoh Penelitiannya*.
- Kumorotomo, W. (1999). *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Kirom, B. (2009). *Mengukur Kinerja Pelayanan Dan Kepuasan Konsumen*. Yogyakarta: Pustaka Reka Cipta.
- Lickona, T. (2012). *Character Matters (Persoalan Karakter), Bagaimana Membantu Anak Mengembangkan Penilaian Yang Baik, Integritas, dan Kebijakan Penting Lainnya*. Jakarta: Bumi Aksara cetakan pertama
- (2013).*Educating For Character (Mendidik untuk Membentuk Karakter)*, cetakan ketiga (*Bagaimana Sekolah Dapat Mengajarkan Sikap Hormat dan Tanggung jawab*). Jakarta: Bumiaksara.
- Lincoln, Yvonna S., &Egon G.Guba, 1985, *Naturalistic Inquiry*, Beverly Hills:Sage Publication
- Magnis-Soeseno,F.(2005).*Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Magnis-Soeseno,F . (2011).12 *Tokoh etika Abad ke-20*. Cet.7. Yogyakrta: Kanisius.
- (2013).13 *Tokoh etika Sejak Zaman Yunani sampai Abad ke-19*. Cet.16. Yogyakarta: Kanisius
- Mangkunegara, A.P. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Miftah Thoha (2007). *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*. Cet.2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, J. Lexy. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustopadidjaja, AR. Dkk. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1 dari 5 Modul Sosialisasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Muchlas Samani dan Haryanto. (2013). *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*.Cet.3. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng. (2015) *Filsafat Ilmu*, edisi-5 Pengembangan.Yogyakarta: Rake Sarakin

- Mulyasa, E.(2014).*Manajemen Pendidikan karakter*,cet.4. Jakarta: PT. Bumiaksara
- Mulyana, R.(2011).*Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*.Bandung: Alfabeta
- Notonagoro. (1986). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pancuran Tujuh.
- Nawawi Uha, Ismail. (2015). *Budya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja*, Cet.2. Jakarta: Kencana.
- Nucci, L.P., and Narvaez, D. (2016). *Handbook Pendidikan Moral dan Karakter*.Bandung: Nusa Media.
- Nurdin, E.S.(2017a).*Teor-Teori Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: CV.Maulana Medika Grafika
- (2018).*Koherensi Paradigma New Public Service dengan Kebijakan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Umum di Perguruan Tinggi*: Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Indonesia.
- (2019a).*Koherensi Metapolicy dalam Formulasi dan Adopsi dengan Implementasi Kebijakan Publik*: Universitas Pendidikan Indonesia.
- (2019b). *Pembinaan Karakter di Perguruan Tinggi, Birokrasi, dan Persekolahan*. Bandung: Maulana Media Grafika
- Ndraha, T. (2003).*Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru 1 dan 2)*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Novita Puspasari.(2012). *Liberal Education yang dikembangkan oleh Newmann*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. studi eksperimen (Tesis).
- Ornstein, Levine, dan Gutek .(2011). *Landasan Filosofis Pendidikan*. Belmont: Wasworth
- Pope, J. (2003). *Strategi Memberantas Korupsi (Confronting Corruption: The Elements of National Integrity System Elemen Sistem Integritas Nasional)* . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Phenix, P. H.(1964). *Realms of Meaning* . Copyright in United States of America.
- Prawirosuntono dan Suryadi. (2015). *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Bandung: BPFE
- Poespoprodjo (1999).*Filsafat Moral*.Bandung: Pustaka Grafika.
- Raharjo, M.(2008). *Dasar-Dasar Hermeneutika (Antara Intensionalisme dan Gadamerian)*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rizal, A.S. (2012). *Model Pendidikan Nilai Integratif Dalam Tradisi Pesantren Modern (Penelitian Interpretatif Hermeneutis terhadap Fenomena Pendidikan di PP. Al-Basyariyah)*. Disertasi Pendidikan Umum. Bandung: UPI.
- Robbins, Stephen P., Timothy A. Judge. (2011; 2013). *Organizational Behavior* — 15th ed. Pearson Education, Inc., publishing as Prentice Hall .
- Robbins, Stephen P., Timothy A. Judge. (1996). *Organizational Behavior (Perilaku Organisasi)*,edisi Bahasa Indonesia. Penerj.Hadyana Pujaatmaka.Jakarta: Prenhallindo.
- Russel, B. (2007).*Sejarah Filsafat Barat, dan kaitannya dengan kondisi sosio-politik zaman kuno hingga sekarang*.cet-3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rusmanan. (2014). *Model-Model Pembelajaran*. Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. (2007). *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

- Robert C. Solomon & Kathleen M. Higgins, 2003: 1-6, terjemahan *A Histhoryof Philosophy*, Oxford University Press, 1996).
- Russel, Betrand. (2007) , *Sejarah Filsafat Barat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Setiawan, Rony .(2015). *Pengaruh Kepemimpinan Pelayan dan Iklim Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja serta Dampaknya pada Kinerja Pelayanan Publik (Studi pada Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Bekasi)*. Disertasi UNPAD.
- Santrock, J.W.(2011). *Psikologi Pendidikan*.edisi-2. Jakarta: Kencana Media Group.
- Sahidah, A.(t.t.) *Filsafat Hermeneutika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sulistiyani, A.T. (2011).*Memahami Good Governance (dalam Perspektif Sumber Daya Manusia)*.cet-1.Yogyakarta: Gaya Media.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.
- Sukmadinata, N.S.(2011).*Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, Kerjasama Program Pascasarjana Universitas Pendidikan (UPI).
- Supardji.(2015).*Revolusi Mental*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafiie, I.K. (2011).*Etika Pemerintahan*. cet.1. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Samani, Muchlas., & Haryanto.(2013).*Konsep dan Model Pendidikan Karakter*, cet.3. Bandung: PT. Rosdakarya.
- Solomon, R.C. & Higgins, K.M. (2003).*Sejarah Filsafat*. cet-2. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Sinambela, L.P.(2006).*Reformasi Pelayanan Publik,Teori,Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Akasara.
- Tim Penyusun Fakultas Filsafat UGM. (1997). *Filsafat Ilmu. sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan*.edisi-1.Yogyakarta: Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan (LP3) Universitas Gadjah Mada.
- The United Nations Development Program (UNDP). 5 prinsip Good Governance (Five Principles of Good Gonernance)*
- Wibowo. (2016). *Perilaku Dalam Organisasi*. Jakarta:PT Rajagrafindo Persada.
- Yakub, I.(1988, hlm. 144-152).*Ihya 'Al-Ghazali*. cet-5. Jakarta: C.V.Faizan
- Yukl. Gary. (2010). *Kepemimpinan dalam Organisasi*, Edisi Kelima. Jakarta: PT. Indeks.
- Zubair, A. (2005). *Tinjauan Moral dan Kultural terhadap Hedonisme di Kalangan Generasi Muda*, Jakarta: Teraju Mizan,
- Zuabair, A. (1995).*Kuliah Etika*.cet.3. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Referensi Jurnal

- Chris Muellerleile and Susan L. Robertson (2018). *Digital Weberianism: Bureaucracy, Information, and the Techno-rationality of Neoliberal Capitalism*. *Indiana Journal of Global Legal Studies*.Vol. 25, No. 1 (2018), pp. 187-216. Published by: [Indiana University Press](#), DOI: 10.2979/indjglolegstu.25.1.0187
<https://www.jstor.org/stable/10.2979/indjglolegstu.25.1.0187>.Page Count: 30)

- Chintyawati, R., & Handayani, N. (2017). *Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Unit Terpadu Satu Atap (Uptsu) Kota Surabaya. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(8).
- Darwanis & Sephi Chairunnisa. (2013). *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Vol. 6 No. 2 Juli. 150-174
- Efrianti, R., & Lestari, E. (2017). *Sistem Pelayanan Satu Atap Berbasis Sistem Pendukung Keputusan dalam Pemilihan Guru Berprestasi (Studi Kasus: Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat)*. KNTIA, 4.
- Febliany, I., Fitriyah, N., & Paselle, E. (2017). *Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Penyerapan Investasi Di Kalimantan Timur (Studi pada Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur)*. Jurnal Administrative Reform (JAR), 2(3). 410-420.
- Fauzan, M., Suhita, D. Dan Bhudianto, W. (2017). *Efektivitas Pelayanan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Surakarta*. E-Jurnal : Transformasi No. 28 Tahun 2015 Volume I,1-88
- Faris Bayu Septyan, Mohammad Al Musadieq dan Mohammad Djudi Mukzam (2017). *Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Terhadap Motivasi Dan Kinerja (Studi Pada Karyawan Cv. Jade Indopratama Malang)*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 53 No. 1 Desember 2017| administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id
- Lin, Y., Eisingerich, A., & Doong, H. (2017). *Tyrant Leaders as e-Government Service Promoters: The Role of Transparency and Tyranny in the Implementation of e-Government Service*. In International Conference on Electronic Government and the Information Systems Perspective (pp. 9-18). Springer, Cham.
- Mustafid, H. (2017). *Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Budaya*,Jurnal on line :Tarbawi [Vol 3 No 01](#).
- Mtd, R. Z., & Afrita, A. (2017). *Penerapan Sanksi Administrasi Disiplin Aparatur Sipil Negara sebagai Upaya Pembentukan Aparatur Yang Bersih Dan Berwibawa Di Pemerintahan Kota Medan, Hukum dan Negara*. Jurnal Universitas Andalas (<http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/30868>)
- Munthe, I. K. (2018). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara Ditinjau Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 17(2).
- Nurdin,E.S.(2017b). *Civic Education policies: Their effect on university students spirit of nationalism and patriotism*. Citizenship Social and Economics Education: Sage
- Pope, J. (2003). *Strategi Memberantas Korupsi (Confronting Corruption: The Elements of National Integrity System= Elemen Sistem Integritas Nasional)* International Journal of Lifelong Education, Volume 26, Number 5, September 2007, pp. 495-511(17).
- Pimploi Tirastittam, Sotarat Thammaboopadee, Rojjalak Chuckpawong (2018).
- Setiawan,D. (2012, hlm.1). *Menata Ulang Praktek Good Governance di Indonesia (Restructuring Goodgovernance Practices in Indonesia)*, Jurnal Analisis Sosial Vol.17 No.1.

- Solihin, D.(2012a), “*Overview dan Capaian Implementasi Good Governance di Indonesia Dari Sudut Pandang Pemerintah*”. Jurnal Analisis Sosial Vol.17 No.1.
- (2012b) *5 prinsip Good Governance (Five Principles of Good Gonernance)* (Bappenas, 2007, Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik). Jurnal Analisis Sosial Vol.17 No.1.
- Respons. (2009). *Jurnal Etika Sosial*, volume 14- nomor 01 Juli 2009.
- Rizal , A. (2013). *Orientasi Metodologis Dalam Pendidikan Nilai*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim , Volume 11 No 1. (2013).
- Setyadiharja,R., Nurmandi, A. (2014). *Implementasi Sistem E-Procurement Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)Provinsi Kepulauan Riau*. DOI: 10.18196/jgpp.2014.0015.
- Stokes, Helen& Wyn, Johanna. (2007). “*How does a newcomer construct identity? A socio-cultural approach to workplace learning*”.International Journal of Life long Education , Volume 26, Issue 1.
- Saidi, A.(2015).*Pembagian Epistemologi Habermas Dan Implikasinya Terhadap Metodologi Penelitian Sosial-Budaya*, Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 17 No. 2 Tahun
- The Royal Society. (2004).*The Social Context of Well-being*, published online 31 Agustus 2004.
- Yuslim, J. (2013). *Pembinaan Sumber Daya Aparatur Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kantor Camat Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Implementasi Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil)*. Kutai Kartanegara: Universitas Mulawarman.
- 2013 – *eJournal Administrative Reform*. 1 (1): 160-174. ISSN 0000-0000.
- Thompson, Mel.(2007).*Ethics*, UK, Great Britain for Hodder& Stoghton Education a division of Hodder Headline Ltd.338 Euston Road, London NW1 38H by Cox & Wyman Ltd, Reading Berkshire.
- Wiranta, D. N. (2015). *Transformasi Birokrasi: Cara Untuk Penguatan Etika Dan Integritas Dalam Pencegahan Korupsi*. Jurnal Lingkar WidyaSwara, 2(4), 44-71.
- Winecof, L.H.(1987). *Concepts in Values Education*. Hand Out pada FPIPS UPI (tidak dipublikasikan)
- Watunglawar, M. N. (2015). *Perwujudan Asas Netralitas Birokrasi Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Doctoral Dissertation)*.Yogyakarta: Jurnal Ilmu Pemerintahan UMY
- Winarno, B. (2012). *Agenda Good Governance dan Globalisasi Ekonomi: Suatu Tinjauan Kritis*. Jurnal Hubungan Internasional Vol. 1 No. 2 / Oktober 2012 (<http://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/download/327/375>).

Peraturan dan Per Undang-Undangan

1. Pancasila
2. Undang-Undang Dasar 1945
3. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS
4. Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah , pengganti Undang-Undang No. 22 tahun 1999

5. Undang-Undang (UU) nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
7. Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dalam Modul 1 (dari 5 Modul), Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tertanggal 29 November 1971 tentang KORPRI
9. Tap MPR RI No.XI /MPR/1999 tentang dasar-dasar perubahan manajemen pemerintahan Keputusan MENPAN No 63/2003 tentang Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik; Keputusan MENPAN No 26/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tanggal 17 Januari 2012 Deskripsi Jenjang Kualifikasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Sumber Internet:

- Becker, Howard. (t.t) *Encyclopedia Social Science.* Diakses dari <https://www.encyclopedia.com/social-sciences/applied-and-social-sciences-magazines/becker-howard>.
- Susatyo, Bambang (2016). *Jalan Buntu 15 Tahun Pemberantasan Korupsi*. Diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/1164072/18/jalan-buntu-15-tahun-pemberantasan-korupsi-1482135733> 20, Desember 2016 hlm.8. 15:22 WIB
- Campbell & Stanley,. (1963). dalam Nawawi *A dictionary of the social sciences* diakses dari <https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/pengertian-visi-dan-misi.html>
- Faris Bayu Septyan, Mochammad Al Musadieq dan Mochammad Djudi Mukzam (2017). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional terhadap Motivasi dan Kinerja (Studi Pada Karyawan CV. Jade Indopratama Malang). Diakses dari <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/viewFile/2185/2583>
- Rees, Erik. 2001. *Seven Principles of Transformational Leadership: Creating A Synergy of Energy.* Online: cicministry.org. diakses dari <https://www.kajianpustaka.com/2017/08/kepemimpinan-transformasional.html>

- Kluckhohn and Strodtbeck's Cultural Dimensions (uploaded by Luciara Nardon)
[https://www.researchgate.net/figure/Kluckhohn-and-Strodtbecks-Cultural-Dimensions_tbl1_23646752.](https://www.researchgate.net/figure/Kluckhohn-and-Strodtbecks-Cultural-Dimensions_tbl1_23646752)
- Koran SINDO. (2014). Senin, 11 Agustus 2014 - 16:58 WIB Kasus Pungutan Liar (pungli) Jati Gede3,3 M . Diakses dari Sindo Newys.com, 14 Agustus 2015;
- Tentang perizinan Pelindo di Kementerian Perhubungan adanya aliran dana pemerasan oleh BKD. Diakses dari Sindo Newys.com, 12 Oktober 2016.
- 47 Personil Polda Jateng), Operasi tangkap tangan terhadap 4 pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Kepri, Batam (Senin, 17 Oktober 2016) berdasarkan laporan masyarakat karena adanya pungutan liar dalam pengurusan KTP. Diakses dari Sindo Newys.com, 18 Oktober 2016;
- Proyek E-KTP di Kemendagri - Kependudukan dan Catatan Sipil . Diakses dari Sindo Newys.com, 22 Oktober 2016).
- Kementerian Hukum dan HAM mencatat adanya 350 000 laporan yang masuk setelah adanya paket kebijakan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) (Sindo Newys.com, 31 Oktober 2016).
- Nugraha, Rizki(2015). *Daftar Tangkapan Terbesar KPK*. Diakses dari <http://www.dw.de/daftar-tangkapan-terbesar-kpk/a-18214980> Deytri Robekka Aritonang <https://nasional.kompas.com>
- Ramadhan, Hafizh (2017). *Hadits-hadits tentang Pendidikan akhlak dan Sosial*: Diakses dari <https://hafizhramadan.wordpress.com/2017/12/28/hadis-hadis-tentang-pendidikan-akhlak-dan-pendidikan-sosial/>.
- Jurnal Pembangunan Pendidikan UNY a. Diakses dari <https://journal.uny.ac.id/index.php/jppfa/article/viewFile/7821/8641>
- Jurnal Pembangunan Pendidikan UNY b. Diakses dari <https://journal.uny.ac.id/index.php/fondasia/article/download/5866/5071>
- Jurnal Masyarakat dan Budaya (jmb.lipi.go.id/index.php/jmb/article/download/278/252)
- Jumlah kasus korupsi 2014. Diakses dari <http://www.jokowinomics.com/2015/02/20/berita/ekonomi/jumlah-kasus-korupsi-indonesia-meroket-di-tahun-2014>
- Kasus money polytic dalam PILKADA : Diakses dari Suara Pembaruan 18 Desember 2012; www harapan rakyat.com, 2014, 7 April; jabarprof.go.id, news, 2014/03/28, T 28 Maret 2014; http : Tempo.co/http/Ardi Winangun, 17 Februari, 2017, <https://www.kompasiana.com;> Nurhayati, Kompas.com 19 Feb 2018;)
- Kasus Gayus Tambunan yang dinilai masih terlalu ringan. Diakses dari http://lipsus.kompas.com/_topikpilihanlist/1111/1/vonis.gayus. Konsep Pendidikan Umum (General Education)http://csusm.edu/mcwilliams/liberal_arts.htmfile:///C:/Users/.../Desktop/Dokumen%20Pribadi/General_Education.pdf
- Muellerleile, Chris and Robertson, Susan L. (2018) *Digital Weberianism: Bureaucracy, Information, and the Techno-rationality of Neoliberal Capitalism*, Indiana Journal of Global Legal Studies: Vol. 25 : Iss. 1 , Article 9.
(Available at: <https://www.repository.law.indiana.edu/ijgls/vol25/iss1/9>)

Rees, Erik. 2001. Seven Principles of Transformational Leadership: Creating A Synergy of Energy. Online: cicministry.or
(<https://www.kajianpu.staka.com/2017/08/kepemimpinan-transformasional.html>)

Sultan Burhani: 20 Januari 2018 -12 Desember 2018 terdapat 21 Kepala Daerah, merupakan jumlah terbesar kasus korupsi yang tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK (<http://facebook.com>).

Sofyan Sauri. (2009). Filosofi Pendidikan Umum/Nilai Pohon meraksasa itulah yang dianggap tepat sebagai tamtsil dari pendidikan umum. Diakses dari sofyannpu.blogspot.com/2009/05/landasan-filosofi-pendidikan-umumnilai.html

Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com 20 Februari 2019 | 17:45 WIB

